

# Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Aparatur Desa

**Author:**  
Abdiyanto<sup>1</sup>

**Affiliation:**  
Universitas Pembangunan Panca Budi<sup>1</sup>

**Corresponding email**  
abdiyanto@dosen.pancabudi.ac.id



*This is an Creative Commons License This work is licensed  
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

**Abstrak:**

**Latar Belakang :**

Keterbatasan Pemahaman Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Banyak aparatur desa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan perencanaan pembangunan desa seringkali berfokus pada kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

**Metode Pelaksanaan :** Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik aparatur desa. Menganalisis kondisi dan potensi desa dan Menyusun materi pelatihan yang relevan dan kontekstual. Pelatihan Dasar Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Menyelenggarakan workshop tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Memperkenalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diskusi tentang relevansi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa

**Hasil :** 85% aparatur desa menunjukkan peningkatan pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan. 70% mampu mengidentifikasi minimal 3 aspek utama pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan). 75% aparatur desa berhasil menyusun visi dan misi desa yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan. 60% menunjukkan kemampuan dalam melakukan analisis SWOT desa dengan perspektif keberlanjutan.

**Kesimpulan :** Peningkatan Kapasitas yang Signifikan: Program peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan telah menunjukkan hasil yang positif. Terjadi peningkatan pemahaman konsep, kemampuan perencanaan strategis, dan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam rencana pembangunan desa. Integrasi SDGs yang Progresif: Aparatur desa telah mulai mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam perencanaan desa, menunjukkan kesadaran akan pentingnya keselarasan pembangunan lokal dengan agenda global.

**Kata Kunci:** Pembangunan Berkelanjutan.

## Pendahuluan

Keterbatasan Pemahaman Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Banyak aparatur desa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan perencanaan pembangunan desa seringkali berfokus pada kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Kurangnya Kapasitas dalam Perencanaan Strategis, aparatur desa sering menghadapi kesulitan dalam menyusun rencana pembangunan yang strategis dan terintegrasi. Kecenderungan untuk fokus pada proyek-proyek parsial tanpa visi jangka panjang yang jelas menghambat pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Ketidakselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perencanaan pembangunan desa seringkali tidak selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kemampuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam rencana pembangunan desa. Keterbatasan Data dan Analisis, banyak desa menghadapi kendala dalam hal ketersediaan dan kualitas data untuk perencanaan. Kemampuan aparatur desa dalam menganalisis data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti masih perlu ditingkatkan.

## Literature Review

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Desa Sumber: "Sustainable Development at the Village Level: Challenges and Opportunities" (Journal of Rural Studies, 2019) Ringkasan: Artikel ini mengeksplorasi bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan di tingkat desa, dengan fokus pada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Peran Aparatur Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan Sumber: "The Role of Village Officials in Sustainable Rural Development" (World Development, 2020) Ringkasan: Studi ini menganalisis peran kritis aparatur desa dalam merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif pembangunan berkelanjutan, serta tantangan yang mereka hadapi.
3. Integrasi SDGs dalam Perencanaan Desa Sumber: "Localizing the SDGs: Strategies for Village-Level Implementation" (Sustainability, 2021) Ringkasan: Penelitian ini menyajikan strategi praktis untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam proses perencanaan pembangunan desa.

## Metode Pelaksanaan

1. Persiapan dan Analisis Kebutuhan:
  - a. Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik aparatur desa
  - b. Menganalisis kondisi dan potensi desa
  - c. Menyusun materi pelatihan yang relevan dan kontekstual
2. Pelatihan Dasar Konsep Pembangunan Berkelanjutan:
  - a. Menyelenggarakan workshop tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
  - b. Memperkenalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
  - c. Diskusi tentang relevansi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa
3. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Strategis:
  - a. Pelatihan penyusunan visi dan misi desa berkelanjutan
  - b. Workshop teknik analisis SWOT dan perumusan strategi
  - c. Praktik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)

4. Pengenalan Metode Partisipatif:
  - a. Pelatihan teknik fasilitasi masyarakat
  - b. Simulasi musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)
  - c. Praktik penggunaan alat participatory rural appraisal (PRA)
5. Pengelolaan Data dan Analisis:
  - a. Pelatihan pengumpulan dan pengelolaan data desa
  - b. Workshop analisis data untuk pengambilan keputusan
  - c. Pengenalan sistem informasi desa
  - d.

## Hasil

1. Peningkatan Pemahaman Konsep:
  - a. 85% aparatur desa menunjukkan peningkatan pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan.
  - b. 70% mampu mengidentifikasi minimal 3 aspek utama pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan).
2. Kapasitas Perencanaan Strategis:
  - a. 75% aparatur desa berhasil menyusun visi dan misi desa yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan.
  - b. 60% menunjukkan kemampuan dalam melakukan analisis SWOT desa dengan perspektif keberlanjutan.
3. Integrasi SDGs:
  - a. 65% rencana pembangunan desa yang disusun setelah pelatihan menunjukkan keselarasan dengan minimal 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
4. Partisipasi Masyarakat:
  - a. Peningkatan 40% dalam tingkat partisipasi masyarakat pada proses Musrenbangdes.
  - b. 80% aparatur desa melaporkan peningkatan kemampuan dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
5. Pengelolaan Data:
  - a. 70% desa mulai mengimplementasikan sistem pengelolaan data desa yang lebih terstruktur.
  - b. 50% aparatur desa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam analisis data untuk pengambilan keputusan.

## Pembahasan

1. Peningkatan Pemahaman Konsep: Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman aparatur desa tentang pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan fondasi penting untuk implementasi lebih lanjut. Namun, masih ada kesenjangan pemahaman pada 15% aparatur, yang mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih disesuaikan.
2. Kapasitas Perencanaan Strategis: Kemampuan menyusun visi dan misi berbasis keberlanjutan menunjukkan perkembangan positif. Namun, kemampuan analisis SWOT yang lebih rendah (60%) mengindikasikan perlunya penguatan lebih lanjut dalam keterampilan analitis.
3. Integrasi SDGs: Keselarasan dengan SDGs dalam 65% rencana pembangunan menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan. Perlu eksplorasi lebih lanjut tentang tantangan dalam mengintegrasikan SDGs yang lebih kompleks.

## Kesimpulan

1. Peningkatan Kapasitas yang Signifikan: Program peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan telah menunjukkan hasil yang positif. Terjadi peningkatan pemahaman konsep, kemampuan perencanaan strategis, dan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam rencana pembangunan desa.
2. Integrasi SDGs yang Progresif: Aparatur desa telah mulai mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam perencanaan desa, menunjukkan kesadaran akan pentingnya keselarasan pembangunan lokal dengan agenda global.
3. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Terdapat peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, menandakan berhasilnya upaya untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif.

## Referensi

- Mulyani, S. (2018). *Perencanaan Kota Berkelanjutan: Pendekatan Ekosistem*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip perencanaan kota yang berkelanjutan, yang juga relevan untuk diterapkan di tingkat desa.
- Soemarwoto, O. (2015). *Ekologi Manusia dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Buku ini membahas hubungan antara manusia dan lingkungan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dalam pembangunan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk perencanaan pembangunan desa.